

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA JL. SISINGAMANGARAJA MEDAN

<sup>1</sup>Deliana Br Perangin Angin, <sup>2</sup>Melisa Zuriani Hasibuan

<sup>12</sup>Fakultas Ekonomi, Manajemen Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah,  
Medan

Email: [deliananangin@gmail.com](mailto:deliananangin@gmail.com)

### ABSTRAK

*Penelitian ini berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Jl. Sisingamangaraja Medan”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dilihat dari analisis rasio keserasian belanja, besarnya belanja tidak langsung dan sisanya dialokasikan untuk belanja langsung. Besarnya belanja tidak langsung berada pada kisaran 82%, 78%, 83%. Hal ini disebabkan oleh besarnya belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 17,5%, 30%, 16,9%. Selama periode tiga tahun anggaran kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dinilai tidak baik selama tahun 2018-2020. Kemudian kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dilihat dari analisis efektivitas belanja selama tiga tahun sudah efektif 100% yaitu sebesar 291,30%, 140,56%, 160,16%. Sedangkan kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dilihat dari analisis efisiensi belanja daerah bahwa realisasi anggaran belanja Dinas Kehutanan tergolong tidak efisien karena interval efisiensinya diatas 100%. Hal ini diketahui bahwa efisiensi belanja Dinas Kehutanan sebesar 632,02%, 462,15%, 407,92% selama 2018-2020.*

**Kata Kunci :** Kinerja Keuangan, Rasio Keserasian Belanja, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi

## PENDAHULUAN

Analisis kinerja keuangan adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan kegiatan / pekerjaan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan suatu daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan serta dilaksanakan (Halim:2007). Analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, di samping meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap realisasi APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas otonomi daerah tersebut sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sehingga bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan.

Salah satu tujuan dalam menganalisis kinerja keuangan daerah adalah untuk mengetahui apakah kinerja keuangan daerah mengalami kenaikan atau penurunan. Tetapi secara umum, fenomena yang terjadi adalah kinerja keuangan daerah masih belum stabil serta belum efektif dan efisien.

Halim (2001:167) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber- sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya,

dan ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebihbesar.

Adapun salah satu permasalahan yang sering dialami dinas pemerintahan adalah mengenai permasalahan keuangan. Beberapa permasalahan keuangan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara antara lain: ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber- sumber pendapatan yang ada.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Jl. Sisingamangaraja Medan”.

Masalah yang dijadikan fokus penelitian yang sudah dibatasi, harus dirumuskan dengan jelas dan operasional sehingga dapat diperoleh tujuan yang diinginkan. Dengan demikian masalah dalam penelitian ini penulis rumuskan adalah ”Bagaimana kinerja keuangan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Rasio Keserasian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio

Efisiensi Belanja di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 sampai dengan 2020”.

Setiap pelaksanaan pekerjaan sudah selayaknya mempunyai tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Rasio Keserasian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 sampai dengan 2020.

## LANDASAN TEORI

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Ibnu Syamsi, 1986: 199).

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Ibnu Syamsi, 1986:99) 1) Kemampuan struktural organisasinya; 2) Kemampuan aparatur Pemerintah Daerah; 3) Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat; dan 4) Kemampuan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas

sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul Halim, 2007:231)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, kemudian menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya Arikunto (2010:55). Dalam penelitian ini desain metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu merangkum sejumlah data besar yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. Data yang dimaksud adalah Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2020, dan data terkaitlainnya.

Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Jl. Sisingamangaraja Km. 5,5 No. 14 Medan. Objek dari penelitian ini adalah Laporan Kinerja Keuangan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018-2020.

Adapun data yang diperoleh berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam satuan angka, yaitu laporan realisasi anggaran selama periode tahun 2018-2020. Data kualitatif yaitu data yang memberikan uraian informasi sesuai dengan kenyataan dan kondisi Dinas Kehutanan yang meliputi sejarah Dinas Kehutanan, struktur organisasi, dan informasi lain yang

menyangkut Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Sugiyono (2017:222) “Sumber data adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Wawancara, Studi Dokumentasi dan Studi Pustaka

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Dinas Kehutanan Provsu tahun 2018-2020.

## HASIL PENELITIAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama untuk menyajikan informasi yang mengenai posisi keuangan atas realisasi anggaran dan neraca pada suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengavaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya.

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020**

Uraian	Tahun 2018	
	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN	78.000.000,00	227.283.122,00
BELANJA	156.170.213.825,00	143.648.971.446,00

DAERAH		
BELANJA OPERASIONAL	140.280.226.375,00	134.688.778.030,00
Belanja Pegawai	119.499.172.698,00	119.715.486.221,00
Belanja Barang	20.781.053.677,00	14.973.291.809,00
BELANJA MODAL	15.889.987.450,00	8.960.193.416,00
Belanja Peralatan dan Mesin	408.277.450,00	2.842.000.930,00
Belanja Bangunan dan Gedung	15.481.710.000,00	6.118.192.486,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0
<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2019</b>	
	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
PENDAPATAN	235.632.000,00	331.222.685,00
BELANJA DAERAH	199.935.677.534,00	153.074.986.828,00
BELANJA OPERASIONAL	182.670.895.684,00	142.907.742.647,00
Belanja Pegawai	125.055.230.364,00	108.902.850.479,00
Belanja Barang	57.615.665.320,00	34.004.892.168,00
BELANJA MODAL	17.264.781.850,00	10.167.244.181,00
Belanja Peralatan dan Mesin	12.695.934.750,00	8.276.917.930,00
Belanja Bangunan dan Gedung	4.298.847.100,00	1.650.816.251,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	270.000.000,00	239.510.000,00
<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2020</b>	
	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
PENDAPATAN	141.379.200,00	266.443.664,00
BELANJA DAERAH	121.067.821.711,72	108.689.614.427,00
BELANJA OPERASIONAL	116.933.463.761,72	105.102.257.677,00
Belanja Pegawai	95.511.036.700,00	91.631.942.907,00
Belanja Barang	21.422.427.061,00	13.470.314.770,00
BELANJA MODAL	4.134.357.950,00	3.587.356.750,00
Belanja Peralatan dan Mesin	2.684.874.200,00	2.236.453.900,00
Belanja Bangunan dan Gedung	1.449.483.750,00	1.350.902.850,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0

Sumber : LRA Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam setiap tahun penggunaan anggaran pada instansi khususnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dapat dikatakan pasang surut atau tidak tetap. Selalu ada perubahan yang menarik ketika kita melakukan analisis. Dalam hal ini perubahan dan pertumbuhan dari pengguna anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja keuangan yang ada pada instansi.

Jumlah anggaran yang terealisasi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp78.000.000 dan Rp227.283.122. Sedangkan untuk anggaran belanja operasional pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp140.280.226.375, dan untuk belanja modal jumlah anggarannya sebesar Rp 15.889.987.450.

Peningkatan jumlah anggaran dan anggran yang terealisasi terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp 200.000.000 dan Rp 331.226.685. Dari tabel diatas dapat dilihat peningkatan dan penurunan realisasi anggaran setiap tahunnya. Sedangkan untuk anggaran belanja operasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp 182.670.895.684, dan untuk belanja modal jumlah anggarannya juga mengalami peningkatan sebesar Rp17.264.781.850.

Jumlah anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp 141.379.200 dan Rp226.443.644, Sedangkan untuk anggaran belanja operasional mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi Rp116.933.463.761,72, dan untuk belanja modal juga mengalami penururna jumlah anggarannya sebesar Rp.4.134.357.950.

## 1. Analisis Rasio Kecerasian Belanja

Analisis Kecerasian Belanja Daerah menunjukkan bahwa jika belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung dianggap tidak baik. Dan jika belanja pegawai lebih besar dari 50% dalam total belanja, maka dapat dikatakan juga anggaran belanja tidak baik. Analisis keserasian belanja daerah, secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja dialokasikan untuk belanja tidak langsung. Selama tahun 2018-2020 rata-rata belanja tidak langsung sebesar 79%, sedangkan untuk belanja langsung sebesar 22%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dilihat dari analisis keserasian belanjanya lebih banyak mengeluarkan anggarannya untuk biaya belanja tidak langsung. Dimana belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung.

Analisis keserasian belanja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara jika dilihat selama tiga tahun anggaran, mengalami dampak yang tidak baik selama tiga tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, hal ini dikarenakan penggunaan anggaran lebih terfokus kepada belanja tidak langsung. Jika dilihat dari total keseluruhannya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dikatakan tidak baik dalam penggunaan anggaran khususnya terhadap keserasian belanja antara belanja langsung dan belanja tidaklangsung.

Dampaknya jika belanja tidak langsung lebih besar dari pada belanja langsung maka akan berdampak terhadap pembangunan daerah yang berakibat berkurangnya

dana yang bersentuhan dengan masyarakat ataupun terhadap program kegiatan instansi. Kenaikan belanja tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap pembangunan daerah karena lebih memfokuskan kepada penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai.

Solusi dalam mengatasi dampak tersebut adalah perlunya dilakukan penghematan terhadap dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung guna dialokasikannya untuk keperluan belanja langsung. Serta menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian sasaran maupun targetnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja yang jelas.

## 2. Analisis Rasio Efektivitas

Anggaran PAD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara selalu mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Anggaran dan realisasi pendapatan pada LRA Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 masing-masing sebesar Rp 78.000.000,- dan Rp 227.283.122,-. Realisasi pendapatan LRA tahun 2018 meningkat sebesar Rp 105.251.580,- (86,25%). Pada tahun 2019 masing-masing anggaran dan realisasi pendapatan Dinas Kehutanan sebesar Rp 200.000.000,- dan Rp 331.226.685,-. Realisasi pendapatan LRA tahun 2019 meningkat sebesar Rp 103.939.563,- (45,73%) dibandingkan realisasi pendapatan LRA Dinas Kehutanan tahun 2018. Pada tahun 2020 masing-masing anggaran dan realisasi pendapatan Dinas Kehutanan sebesar Rp 141.379.200,-

(berkurang sebesar 40% setelah adanya P-APBD dari sebelumnya Rp 235.632.000,- akibat adanya Covid-19). Sedangkan realisasi pendapatan pada LRA Dinas Kehutanan tahun 2020 adalah Rp 266.443.644,-. Realisasi pendapatan LRA tahun 2020 menurun sebesar Rp - 64.783.041,- (10,84%) dibandingkan realisasi pendapatan LRA Dinas Kehutanan tahun 2019.

Diketahui bahwa Di tahun 2018 tingkat efektivitas dari anggaran belanja berada pada persentase 291,38% yang menunjukkan angka kisaran Rp 227.283.122, pada tahun ini anggaran dapat dikatakan efektif. Di tahun 2019 mengalami penurunan sekitar 150,82% dengan persentase hanya sekitar 140,56% yang berada pada kisaran Rp 331.222.685, walaupun mengalami penurunan yang banyak tetapi tidak mengurangi nilai ke efektivitasan pengguna anggaran pada instansi tersebut. Di tahun 2020 tingkat efektivitas mengalami kenaikan sekitar 19,6% dengan presentasi sekitar 160,16% yang berada pada kisaran Rp 266.443.644, pada tahun ini anggaran dapat dikatakan efektif. Di tahun 2018, 2019, dan 2020 dapat dikatakan penggunaan anggaran sudah efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100%.

Menurut uraian dan hasil perhitungan, Efektivitas Kinerja Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sudah Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak, retribusi daerah dan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal

merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan.

### 3. Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.6 di atas dapat dijelaskan bahwa Efisiensi Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 sampai dengan 2020 tergolong tidak efisien karena interval efisiensinya di atas 100%. Hal itu terjadi karena total realisasi belanjanya lebih besar daripada total realisasi pendapatan daerahnya.

Pada tahun 2018 tingkat efisiensi pengguna anggaran berada pada persentase 632,02% dengan pengguna anggaran sekitar Rp 143.648.971.446, pada tahun ini pengguna anggaran dapat dikatakan tidak efisien.

Pada tahun 2019 tingkat efisiensi pengguna anggaran berada pada persentase 467,15% dengan pengguna anggaran sekitar Rp 153.074.986.828, pada tahun ini terjadi penurunan sekitar 164,87% dari tahun sebelumnya, meskipun kurangnya dalam penghematan anggaran pada tahun ini tetapi jika dilihat dari perhitungan dan kriteria efisiensi belanjanya maka dapat dikatakan tidak efisien dalam hal penggunaan anggaran.

Pada tahun 2020 tingkat efisiensi pengguna anggaran berada pada persentase 407,92% dengan pengguna anggaran sekitar Rp 108.689.614.427, jika dilihat dari tahun sebelumnya tingkat persentase di tahun ini mengalami sedikit penurunan sekitar 54,23% dari tahun sebelumnya. Penggunaan anggaran yang mengalami penurunan, artinya penggunaan anggaran masih dapat dikatakan tidak efisien di tahun ini.

Rata-rata Efisiensi Keuangan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang tergolong Tidak Efisien diakibatkan karena total belanja daerahnya masih lebih besar daripada pendapatan daerahnya. Meskipun pada tahun 2018 dan 2020 tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sudah dapat menekan belanjanya daripada yang dianggarkan sebelumnya namun jumlah pendapatan yang diperolehnya masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan belanja daerahnya. Sehingga dapat dikatakan kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Kinerja Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di lihat dari analisis rasio keserasian belanja, secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah di alokasikan untuk belanja tidak langsung, dan sisanya dialokasikan untuk belanja langsung. Besarnya belanja tidak langsung berada pada kisaran 82%, 70%, 83%. Hal ini disebabkan oleh besarnya belanja pegawai yang terdiri dari Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk belanja modal berada pada kisaran 17,5%, 30%, 16,9%. Selama tiga tahun anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dinilai tidak baik

dalam penggunaan anggarannya yaitu pada tahun 2018 sampai dengan 2020.

2. Kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dilihat dari analisis efektivitas belanjanya selama tiga tahun dari tahun 2018-2020 sudah efektif. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dikatakan efektif karena efektivitasnya sudah lebih dari 100% yaitu sebesar 291,38%, 140,56%, 160,16%.
3. Kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dilihat dari analisis efisiensi belanja daerah, bahwa realisasi anggaran belanja Dinas Kehutanan tergolong tidak efisien karena interval efisiensinyadiantaradiatas 100%. Hal itu terjadi karena total realisasi belanjanya lebih besar daripada total realisasi pendapatan daerahnya. Diketahui bahwa efisiensi belanja Dinas Kehutanan sebesar 632,02%, 462,15%, 407,92%.

Dari rumusan kesimpulan diatas dapat di simpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja keuangan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2020 belum cukup baik.

### Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara hendaknya berusaha untuk mencapai target PAD, sehingga efektifitas Pendapatan, keserasian belanja daerah bisa lebih baik. Dan menekan biaya pemerolehan Pendapatan sehingga tingkat efisiensi dapat terwujud. Dari analisis keserasian belanja dapat disarankan, perlu adanya

perhatian khusus dari instansi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam penggunaan anggaran belanja terhadap belanja langsung. Dimana belanja langsung ini sangat berperan terhadap kegiatan operasional instansi. Dan sebaiknya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dapat mengoptimalkan kinerja instansinya dengan mengalokasikan penggunaan anggaran pada pembiayaan belanja langsung, karena ini sudah menjadi urusan tetap yang harus disegerakan untuk pembiayaan selama periode anggaran.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
  - a. Periode penelitian ini terbatas untuk tahun 2018-2020. Diharapkan peneliti selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis kinerja keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.
  - b. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama diharapkan untuk lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat daripada penelitian oleh penulis ini. Dan memperluas lingkup wilayah penelitiannya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta:



- Salemba Empat.
- Abdul Halim. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Erlina, Dkk. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Aries Djaenuri. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fahmi, Irham. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Ke-2. Bandung: Alfabeta.
- Ibnu Syamsi. 1986. *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, Dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional Dan Regional*. Jakarta: CV Rajawali.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi. Mohammad Mahsun. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:BPFE.
- S. Munawir. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Kab.Lamongan). Jurnal p-ISSN 2502-3764 e-ISSN 2621-3168, *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)* Volume 4 No. 2, Juni 2019.
- Aramide Sanusi Fasilat, Bashir Musthapa Muhammad, 2015. The Effectiveness of internal system and financial at local government level in Nigeria. *International Journal of Research in Bussiness Management (IMPACT : IJRBM)*. Vol. 3, Issue 8, Aug 2015, 1-6 ISSN (E) : 2321-886X ; ISSN (P) 2347-4527.
- Arthaingan H.Mutiha. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010-2014. *Journal of Vocational Program University of Indonesia*. Volume 4 Nomor 2,pp 105-121.
- Chen, Tser-Yieth, Tsai-Lien Yeh and Mao-ming Chung. 2012. Financial Performance of Township Governments and its Four Budget Cycles. *African Journal of Business Management*. 6(2): h: 530-537.
- Monika Lara, Bustari Andre. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Solok. *Pareso Jurna*. Vol, 2, No. 1, Maret 2020, ISNN (O) 2656-8314 ; ISNN (P) 2442 7479, Hal. 98-111.
- Mega O. Ropa. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*. ISSN 2303-1174, Vol.4 No.2 Juni 2016, Hal.738-747.

**Jurnal:**

Anshori Zakaria. 2019. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016-2018 (Studi Kasus Pada BPKAD

M.F.Pandjaitan.,P.Tommy.,V.N.Unt  
u. 2018. Analisis Kinerja  
Keuangan Daerah Pemerintah  
Kota Manado Tahun 2011-2016.  
*Jurnal EMBA*. ISSN 2303-  
1174, Vol.6 No.3 Juli 2018, Hal.  
1398 – 1407.

**Skripsi:**

Evelina Lasrianti Aruan. Analisis  
Kinerja Keuangan Badan  
Perencanaan Pembangunan  
Daerah (BAPPEDA) Provinsi  
Sumatera Utara. (Skripsi.  
Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara).

Intan Marlin. Analisis Kinerja  
Keuangan Pemerintah Daerah  
Lampung Tahun 2013-2017  
Dalam Perspektif Islam.  
(Skripsi.Universitas Negeri  
Raden Intan Lampung).

T. Easterevribora Sihombing.  
Analisis Kinerja Keuangan Pada  
Dinas Perhubungan Sumatera  
Utara. (Skripsi.Universitas  
HKBPNNommensen).

Hony Adhiantoko. Analisis Kinerja  
Keuangan Pemerintah  
Kabupaten Blora (Studi Kasus  
Pada Dinas Pendapatan  
Pengelolaan Keuangan Dan Aset  
Daerah Kabupaten Blora Tahun  
2007-2011. (Skripsi. Universitas  
Negeri Yogyakarta).